



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 13 Mei 2026

Halaman: 2

Pembangunan PSEL Mundur

Pemerintah Masih Kaji Kuota Sampah hingga Tambahan Lahan

JOGJA - Rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dipastikan mundur. Kebutuhan terkait kuota sampah yang menjadi syarat wajib bahan baku PSEL masih dalam pengkajian.

"Karena memang mengkaji volume sampah 1.000 ton per hari masih menjadi bahan pertimbangan juga," ujar Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo setelah pertemuan bersama kepala daerah dan gubernur DIJ di Kompleks Kepatihan Jogja kemarin (12/5).

Menurutnya, ada draf MoU baru

yang mengatur tentang kesediaan 1.000 ton sampah untuk PSEL. Dalam draf tersebut dikatakan terdapat skema sanksi apabila pemerintah daerah tidak bisa memenuhi kuota sampah yang telah disebutkan.

"Pemerintah daerah kena *punishment* atau sanksi untuk membayar kekurangan, misal begitu. Tapi ini masih draf," jelasnya.

Draf tersebut masih dalam tahap pengkajian sambil mempersiapkan masuk ke *batch* 2. Selain membahas kesediaan kuota, audiensi tersebut juga membahas terkait kebutuhan lahan tambahan untuk PSEL di TPA Piyungan. Sebab luasan 5,7 hektare lahan yang disiapkan ternyata masih kurang.

"Itu masih dibutuhkan lagi tambahan lahan untuk menaruh residu atau

abunya, kira-kira 1 hektar," paparnya.

Ia menambahkan, secara umum program pengolahan sampah dari hulu ke hilir di Kota Jogja relatif terkendali. Gerakan Mas Jos yang masif dilakukan mampu menyelesaikan masalah sampah sebesar 300 ton. "Sehingga di depo-depo hari ini tidak ada yang numpuk," tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Provinsi DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan awalnya PSEL di DIJ memang masuk ke *batch* pertama. Namun sampai batas waktu akhir April tahun ini, belum ada kesepakatan negosiasi. Sehingga proses pembangunan dimasukkan dalam *batch* kedua. "Jadi kalau dihitung dengan pembangunannya, maka baru bisa beroperasi Juli 2028," ujarnya.

Menurutnya, mundurnya jadwal

pembangunan PSEL menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemprov DIJ maupun kabupaten/kota. Sebab produksi sampah tetap berlangsung setiap hari. Sementara sistem pengolahan baru belum tersedia. Ditambah dengan tenggat waktu pengiriman sampah ke TPA Piyungan hanya sampai akhir 2026.

"PR kita itu *bridging* (mengelola) sampah sampai 2028. Sampah tetap berproduksi setiap hari, jadi harus dicari cara supaya tidak menjadi persoalan," tandasnya.

Dia pun meminta kabupaten/kota untuk memperkuat skema pengelolaan sampah selama masa transisi. Koordinasi antardaerah menjadi sangat penting, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan lahan untuk pengolahan sampah. (*oso/eno/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005